

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Nirmalasari (2020) Menyatakan bahwa teori *Stakeholder* muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *Stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori *Stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat untuk *Stakeholder*. *Stakeholder* itu sendiri terdiri dari pemegang saham, manajer, karyawan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah (Isnaen&Albastiah, 2018).

Pada penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder* sebagai dasar penelitian karena aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik perlu adanya tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Manajemen risiko kredit merupakan suatu upaya perusahaan terhadap peningkatan kinerja keuangan pada perusahaan pembiayaan yang kegiatan operasionalnya memberikan pinjaman dan kredit. Pada penelitian ini peneliti memilih manajemen risiko kredit sebagai variabel independen. Adapun aspek lain yang sejalan dengan teori *Stakeholder*, adanya tata kelola yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap investor dengan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang perlu ditaati oleh perusahaan terbuka. Teori *Stakeholder* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, termaksud karyawan, pelanggan, dan pemegang saham, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang salah satunya dengan memperhatikan ukuran perusahaan, seperti total aset yang dikelola bisa mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat

memenuhi kebutuhan *Stakeholder*, dan dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan.

2.1.2 Manajemen Risiko Kredit

Mumtazah & Purwanto, (2020). Menyatakan bahwa teori *Stakeholder* merupakan teori yang berkaitan tentang bagaimana hubungan antara manajer, pemangku kepentingan dan bagaimana mereka memandang tindakan dan peran mereka. Agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik perlu adanya tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh manajemen risiko kredit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020, manajemen risiko sebuah lembaga keuangan memiliki tujuan, meliputi hal berikut ini:

● a. Menyelaraskan antara *risk appetite* dan strategi

Pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menentukan *risk appetite* yang bisa diterima bisnis dan strategi yang dipakai oleh mereka. *Risk appetite* merupakan tingkat risiko yang bisa diterima oleh perusahaan untuk meraih tujuan bisnisnya.

b. Mengaitkan antara pertumbuhan, risiko, dan imbal hasil

Hal ini bertujuan untuk menyediakan dan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dan menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima relatif terhadap tujuan pertumbuhan dan laba. Misalnya beberapa bank menetapkan target kredit macet di bawah 5% untuk meraih pertumbuhan laba tertentu.

c. Minimalkan guncangan dan kerugian operasional

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi risiko, menilai risiko dan menetapkan tanggapan sehingga dapat mengurangi terjadinya guncangan dan kerugian.

d. Identifikasi dan kelola risiko-silang

Setiap aktivitas bisnis menghadapi banyak risiko. Perusahaan tidak hanya mengelola risiko secara individual, tetapi juga mengelola dampak yang saling terkait.

Dalam aktivitas operasional perusahaan mengenai pemberian kredit kepada masyarakat (debitur), maka perusahaan akan menghadapi risiko kredit. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan nasabah membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat membayar dan melunasi tagihannya. Maramis, A. (2019) Menyatakan bahwa risiko kredit secara umum terdapat pada segala aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur. Risiko Kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan, antara lain pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

Menurut Korompis, Murni., & Untu. (2020) Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perusahaan adalah munculnya NPL yang semakin besar, NPL yang tinggi akan meningkatkan biaya pencadangan aktiva produktif dan biaya lainnya, sehingga Dalam penelitian ini tingkat risiko kredit diprioritaskan dengan NPL (*Non Performing Loan*), karena NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada pada periode tertentu dan dapat dipenuhi akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa NPL merupakan indikasi masalah di perusahaan baik dari perusahaan perbankan maupun pembiayaan yang berdampak negatif apabila tidak segera diperbaiki.

Nurhidayah, F. (2023) Memberikan beberapa cara untuk memperkecil risiko kredit antara lain :

1. Standar kredit yang tinggi, yang dimaksud adalah status kredit calon debitur harus ditentukan sebelum pinjaman diberikan.

2. Portofolio calon peminjam perlu diverifikasi, prinsip verifikasi dari sliK OJK, total pendapatan tiap bulan, besaran tanggungan, bidang usaha pekerjaan, lama bekerja dan status karyawan dalam bekerja, hal ini merupakan sebuah cara untuk meminimalisir risiko.
3. Bank atau leasing terbiasa mengurangi risiko kredit dengan memberikan asuransi atas pinjaman yang dijadikan jaminan bagi perusahaan asuransi.

Saputra, A., & Wijayanti, N. (2023) Menyatakan bahwa perusahaan dapat menganalisis dan mengevaluasi semua aktivitas yang telah dan sedang dilakukan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang, dengan menyusun strategi perencanaan baru sesuai dengan hasil berkelanjutan dari manajemen risiko perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan upaya atau tindakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan pembiayaan, yaitu melakukan manajemen risiko kredit.

2.1.3 Tata Kelola

Menurut Susetyo, P & Ramdani, H. (2020) Tata kelola merupakan suatu proses yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi.

Sesuai dengan teori *Stakeholder* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang mementingkan kepentingan sendiri tetapi harus memikirkan *Stakeholdernya*. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap investor dengan menyajikan laporan kinerja keuangan yang patuh terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hadistya, D., & Hardika. (2021) Menyatakan bahwa ada 5 prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya:

1. Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi mengedepankan agar perusahaan mempersiapkan informasi yang material serta relevan agar dapat diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya pertanggungjawaban kinerja pengelolaan perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip responsibilitas mewajibkan perusahaan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan menunaikan tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan yang merupakan prasyarat untuk mencapai keberlanjutan usaha.

4. Independensi (*independency*)

Prinsip independensi mengedepankan agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak lainnya

5. Kewajaran (*fairness*)

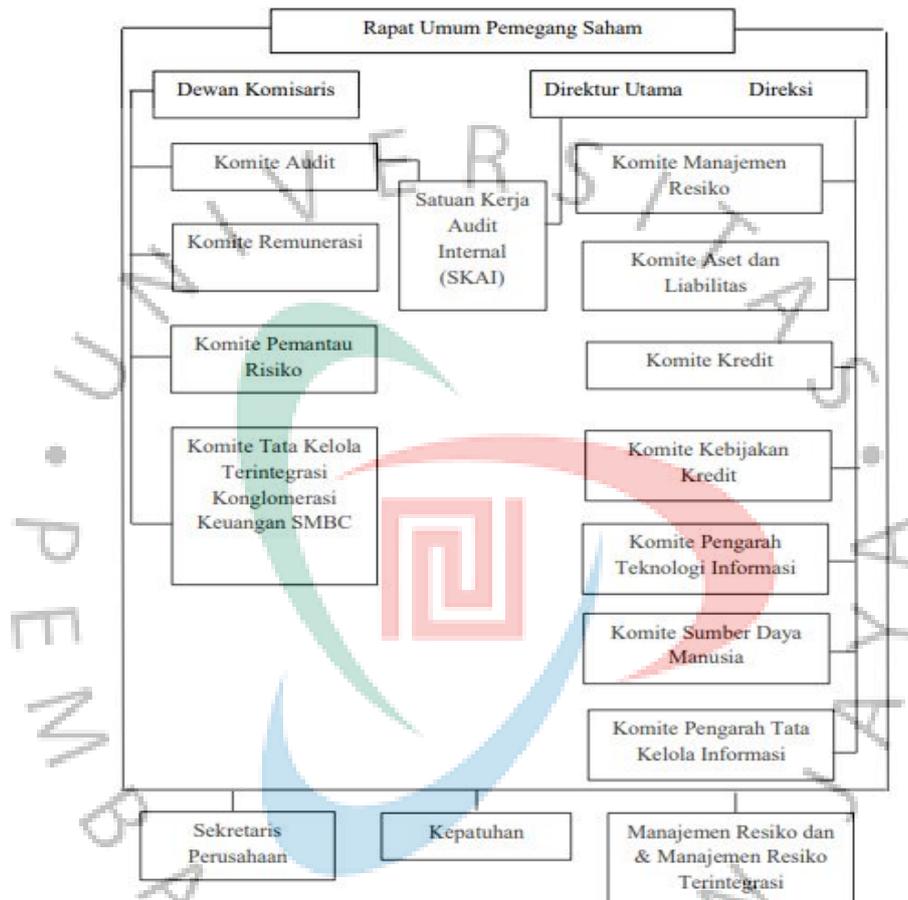
Kewajaran dan kesetaraan mengharuskan perusahaan untuk mengakomodasi kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lain dengan wajar dan setara.

Investor di pasar modal bertujuan untuk memperoleh profit yang didapat dari selisih dari harga beli saham dengan harga jual saham asetya. Keuntungan tersebut akan dapat diperoleh investor sepanjang perusahaan tersebut memiliki fundamental keuangan dan prospek usaha yang baik. Penilaian fundamental dan prospek usaha tersebut dapat diambil oleh investor berdasarkan informasi material terkait perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut. Herlina (2018) Menyatakan bahwa dalam konteks pasar modal, transparansi dalam pengelolaan perusahaan merupakan salah satu prinsip perlindungan hukum kepada investor.

Setiawan, V., Abubakar, & Rahmawati. (2023) Menyatakan bahwa, jika kepatuhan yang ketat terhadap pemenuhan informasi kepada investor, maka

akan semakin kuat pula pertumbuhan pada sektor pasar modal dan merupakan bentuk perlindungan terhadap investor meliputi pemenuhan terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam kualitas produk investasi. Adapun struktur tata kelola perusahaan sebagai berikut:

Struktur Tata Kelola



Gambar 2.1 Struktur Tata Kelola

Sumber : Data diolah (2023)

Salah satu organ yang mengontrol tata kelola perusahaan yaitu :

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan seseorang yang melakukan kontrol atau pengawasan dari perilaku oportunistis manajemen.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan seseorang yang mengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan, dewan direksi

memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan serta strategi bisnis yang dijalankan dan telah disetujui oleh dewan komisaris agar berjalan efektif.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Purwanti, D. (2021) Menyatakan bahwa total asset, total penjualan dan nilai pasar saham dapat digunakan sebagai proksi untuk mengukur ukuran perusahaan, ketiga proksi ini merupakan proksi yang paling populer digunakan sebagai tolak ukur ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diharapkan mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pihak internal dan eksternal. Sesuai dengan teori *Stakeholder*, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, termaksud karyawan, pelanggan, dan pemegang saham, untuk mencapai keberhasilan jangka panjang salah satunya dengan memperhatikan ukuran perusahaan, seperti total aset yang dikelola bisa mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan *Stakeholder*, dan dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan.

Perusahaan juga dibagi menjadi tiga skala, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar (Sihombing, L. J. 2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 pasal 3, besar kecilnya ukuran perusahaan dikategorikan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki perusahaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SIUP Kecil

SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP Menengah

SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP Besar

SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun menurut Badan Standarisasi Nasional organisasi besar adalah organisasi yang memiliki kekayaan bersih >Rp10.000.000.000 mencakup tanah serta bangunan dan memiliki penghasilan >Rp50.000.000.000 per tahun. Berikut kriteria usaha berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008:

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Berdasarkan UU No.2 Tahun 2008

Kriteria	Kekayaan bersih
Usaha mikro	Rp50.000.000
Usaha kecil	>Rp50.000.000-Rp500.000.000
Usaha menengah	>Rp500.000.000-Rp10.000.000.000

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017)

2.1.5 Kinerja Keuangan

Menurut Nurcahya, A., & Dewi, P. (2020) Kinerja keuangan perusahaan merupakan sebuah pencapaian yang diraih perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sesuai dengan teori *Stakeholder* yang membahas tentang hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya untuk kepentingan bisnis. Perusahaan yang efektif memahami kebutuhan *Stakeholder* maka dapat membangun hubungan yang positif, mendukung kepercayaan dan

menciptakan bisnis yang stabil sehingga dapat persepsi positif dari pasar. Dengan demikian teori *Stakeholder* memiliki peran penting dalam pengelolaan bisnis. Kinerja keuangan perusahaan yang baik dan stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modal pada perusahaan, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai perusahaan.

Penelitian ini dilakukan karena kinerja keuangan menjadi hal yang penting dan sebagai indikator sebuah badan usaha untuk dapat berkembang dan bertahan di era persaingan yang semakin ketat ini. Dengan adanya kinerja keuangan, para investor bisa dengan mudah mengakses informasi terkait kinerja sebuah perusahaan sebelum memutuskan akan menanamkan sahamnya atau tidak.

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam konsep untuk mencapai tujuannya. Efektifitas dapat terjadi apabila manajemen mempunyai kemampuan memilih tujuan yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi merupakan rasio antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal (Nisa, S., & Hariyanti, I. 2022)

2.1.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Cholil, A. (2021) rasio keuangan adalah suatu aktivitas yang membandingkan angka yang satu dengan angka lainnya dalam laporan keuangan yang telah disajikan dengan cara membagi angka yang satu dengan angka yang lainnya, angka tersebut dapat dibandingkan berupa angka dalam satu periode ataupun dengan beberapa periode. Bagi suatu perusahaan, menilai kinerja yang dilakukan adalah penting untuk memberikan informasi apakah perusahaan tersebut bekerja dengan seharusnya pada periode tertentu.

Menurut Shofwatun, Kosasih, & Megawati. (2021) Untuk mengukur kinerja perusahaan digunakan alat yang lazim yaitu rasio keuangan, Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan digunakan analisis rasio keuangan sebagai alat.

Proses ini memiliki tujuan untuk melihat kinerja perusahaan dari sisi keuangan. Hasil atau prestasi atas fungsi pengelolaan aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan menggambarkan kinerja keuangan

2.1.5.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja *financial* suatu entitas dengan membandingkan berbagai rasio yang dihasilkan dari laporan keuangan yang tersaji. Adapun Menurut Mumtazah & Purwanto, (2018) manfaat analisis rasio keuangan, yaitu:

1. Bisa dijadikan alat saat melihat prestasi dan kinerja keuangan perusahaan.
2. Bisa dijadikan rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Mengevaluasi kondisi kinerja keuangan perusahaan.
4. Memiliki manfaat untuk kreditur, bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dan dapat dikaitkan dengan jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Bisa dijadikan sebagai alat penilaian bagi *Stakeholder*.

2.1.5.3 Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Tyas, W., I. (2020) Penilaian kinerja keuangan menggambarkan tingkat efektivitas dari kegiatan operasional sesuai standar dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan sebuah perusahaan dijadikan indikator yang menunjukkan kondisi perusahaan sedang keadaan baik atau buruk. Saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan buruk, para *Stakeholder* akan menganalisa laporan keuangan untuk menilai kinerja diperiode sebelumnya, posisi perusahaan sekarang dan menilai potensi serta risiko diperiode selanjutnya.

Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan bisa dijadikan untuk mempertahankan investasi ataupun pendanaan mereka di perusahaan tersebut atau mencari perusahaan lain. Bagi perusahaan,

informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagai prestasi yang diraih oleh perusahaan dalam periode tertentu untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan operasional.
- b. Dapat dijadikan dasar dalam penentuan strategi perusahaan dimasa yang akan datang.

2.1.5.4 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio untuk membandingkan tingkat beban operasional dengan pendapatan operasional yang diraih pada periode tertentu. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Maulana, 2018). Pendapatan operasional merupakan pemasukan atas penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa, penjualan barang dagang atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

Semakin rendah tingkat rasio BOPO maka semakin efisien perusahaan pada periode tertentu dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang didapatkan perusahaan akan semakin besar. Perhitungan biaya operasional dan pendapatan operasional digunakan untuk mengetahui besarnya biaya operasional dan pendapatan operasional rata-rata yang dihasilkan perusahaan, sekaligus untuk mengukur efisiensi aktivitas bisnis perusahaan. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien.

2.1.5.5 Perusahaan Pembiayaan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang kegiatannya melakukan aktivitas pembiayaan. Berikut jenis aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan pembiayaan:

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah kegiatan penyertaan modal dalam bentuk barang dari *lessor* (pemilik modal barang) kepada *lessee* (pengguna modal barang).

2. Anjak Piutang

Anjak piutang merupakan kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek oleh perusahaan pembiayaan atas perusahaan lain.

3. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembelian barang kebutuhan konsumen oleh perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, konsumen akan membayar biaya pengadaan barang tersebut kepada lembaga pembiayaan dengan cara mengangsur. Kegiatan ini meliputi: kredit mobil baru / bekas, kredit motor baru / bekas.

• 4. Usaha Kartu Kredit

Usaha kartu kredit adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa bagi konsumen dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan tinjauan pustaka berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel yang ingin diuji peneliti. Berikut ringkasan terkait penelitian-penelitian terdahulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Agiuirre, 2023)	Praktik Manajemen Risiko Kredit dan dampaknya terhadap kinerja keuangan BPR	Variabel Independen - Manajemen risiko kredit Variabel Dependen - Kinerja keuangan	Praktik manajemen risiko kredit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan
2.	(Ekinci &	Pengaruh risiko	Variabel Independen	Manajemen risiko

	Poyraz, 2019)	kredit terhadap kinerja keuangan bank simpanan di Turki	- Manajemen risiko kredit Variabel Dependen - Kinerja keuangan	kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
3.	(Korompis, Murni., & Untu, 2020)	Pengaruh risiko pasar (NIM), risiko kredit (NPL), dan risiko likuiditas (LDR) terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA) pada bank yang terdaftar di LQ 45 Periode 2012-2018	Variabel Independen - Risiko pasar (NIM) - Risiko kredit (NPL) - Risiko likuiditas (LDR) Variabel Dependen - Kinerja keuangan	- Risiko pasar berpengaruh signifikan hubungan positif terhadap kinerja keuangan - Risiko kredit berpengaruh signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan - Risiko likuiditas berpengaruh signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan
4.	(Rahmandita, & Mahardika, K.. 2023)	Pengaruh risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar terhadap kinerja keuangan perbankan tahun 2019-2021	Variabel Independen - Risiko likuiditas - Risiko kredit - Risiko pasar Variabel Dependen - Kinerja perusahaan	- Risiko kredit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan
5.	(Dayana, & Untu, N, 2019)	Analisis risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan kecukupan modal terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah se-Indonesia periode 2012-2017	Variabel Independen - Risiko pasar - Risiko kredit - Risiko operasional - Kecukupan modal Variabel Dependen - Kinerja keuangan	- Risiko pasar berpengaruh signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan - Risiko kredit berpengaruh signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan - Risiko operasional berpengaruh

				<p>signifikan hubungan positif terhadap kinerja keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
6.	(El-Chaarani., Abraham., & Skaf, 2022)	Dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan sektor perbankan di kawasan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara): ujian kekebalan bank terhadap COVID-19	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola berdampak positif terhadap kinerja keuangan
7.	(Abdullah & Tursoy, 2023)	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan: bukti dari sistem yang berorientasi pada pemegang saham	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola memiliki dampak signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan
8.	(Intia, & Azizah, 2021)	Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan direksi - Dewan komisaris independen - Dewan pengawas syariah <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
9.	(Ningrum & Rasmini,	Pengaruh risiko keuangan,	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko keuangan

	(2022)	dewan komisaris, dewan direksi terhadap kinerja keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris - Dewan direksi <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja perusahaan 	<p>berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan
10.	(Hartati 2020)	Pengaruh ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan <i>property</i>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris - Komite audit - Kepemilikan institusional <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan
11.	(Sari, Titisari, & Nurlaela, 2020)	Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan (Pada perusahaan manufaktur)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan manajerial - Komite audit - <i>Leverage</i> - Ukuran perusahaan <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan - <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
12.	(Anandamaya	Pengaruh <i>good</i>	Variabel Independen	

	& Hermanto, 2021)	<i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Good corporate governance</i> - Ukuran perusahaan - Leverage Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
13.	(Maryadi, & Dermawan, S., 2019)	Pengaruh ukuran perusahaan, financial leverage, dan liquidity terhadap kinerja keuangan	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan - Financial leverage - Liquidity Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan - Financial leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan - Liquidity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
14.	(Onoyi, J., & Windayati, T. 2021)	Pengaruh ukuran perusahaan, <i>good corporate governance</i> dan efisiensi operasi terhadap	Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan - <i>Good corporate governance</i> - Efisiensi operasi Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> - Kinerja keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan - <i>Good corporate</i>

		kinerja keuangan (Pada bank BUMN yang terdaftar di BEI 2016-2020)		governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan - Efisiensi operasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
15.	(Odaló, K., Achoki, G., & Njuguna, A. 2018)	Mengaitkan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan pada perusahaan pertanian yang terdaftar di bursa efek nairobi di Kenya	Variabel Independen - Ukuran perusahaan Variabel Dependen - Kinerja keuangan	- Ukuran perusahaan berdampak positif terhadap kinerja keuangan

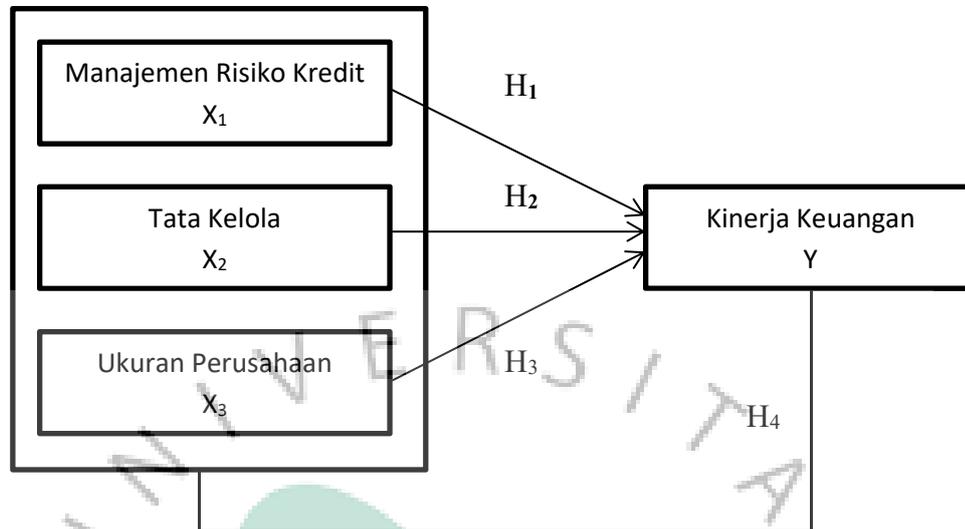
2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat ini

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel seperti manajemen risiko kredit, tata kelola, ukuran perusahaan belum pernah diteliti dengan ketiga variabel x dan variabel y yang sama. Selain itu pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) sebagai tolak ukur pada variabel dependen kinerja keuangan. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan populasi dan sampel dari perusahaan pembiayaan Indonesia sebagai pembaharuan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengambil tiga variabel independen, dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah manajemen risiko kredit, tata kelola dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan.

Berdasarkan teori yang dikaji, maka kerangka pemikiran yang dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian dari teori dan kerangka tersebut digunakan untuk mengukur penelitian antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), berikut spesifik dari hipotesis pada penelitian ini:

2.5.1 Pengaruh Manajemen Risiko Kredit Terhadap Kinerja keuangan

Rasio NPL (*Non Performing Loan*) merupakan kemampuan manajemen perusahaan pembiayaan dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Korompis, Murni., & Untu. (2020) Rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang tinggi maka akan diikuti dengan naiknya besaran biaya cadangan aktiva produktif dan beban lainnya, sehingga bisa berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah. Pendapatan operasional perusahaan pembiayaan didapat dari keberhasilan nasabah untuk mengembalikan atau membayar sejumlah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan, jika tingkat kredit macet

semakin tinggi maka pendapatan operasional perusahaan akan menurun, sedangkan beban operasional terus berjalan.

Menurut Korompis, Murni., & Untu. (2020) Manajemen risiko kredit yang diukur dari rasio NPL (*Non Performance Loan*) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan hasil penelitian dari Dayana, & Untu, N, (2019) bahwa risiko kredit (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan juga menurut (Rahmandita, & Mahardika, K.. 2023) bahwa risiko kredit yang diukur dengan NPL memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.

Dari ketiga hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa manajemen risiko kredit yang diukur dari rasio NPL (*Non Performance Loan*) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kredit macet mengakibatkan penurunan pendapatan karena pembayaran bunga dan pokok kredit yang tidak diterima. Hal ini dapat mengurangi pendapatan operasional yang mengakibatkan penurunan profitabilitas. Sesuai dengan teori *Stakeholder* perusahaan harus melakukan upaya dan tindakan untuk meningkatkan kinerja keuangan salah satunya dengan melakukan manajemen risiko kredit. Maka pada penelitian ini peneliti memiliki hipotesis:

H1 : Manajemen risiko kredit memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.5.2 Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan

Setiap perusahaan membutuhkan tata kelola, karena sistem tata kelola perusahaan yang akan membantu membangun kepercayaan pemegang saham, dan mengatur hubungan antara manager perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan internal.

2.5.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan komisaris merupakan posisi yang bertanggung jawab secara bersama-sama melakukan pengawasan dan memberi pendapat kepada *board of directors* serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*. Menurut hasil penelitian

Honi., Saerang., & Tulung., (2020) Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sesuai dengan teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya mementingkan perusahaan saja tetapi harus peduli dan memiliki manfaat terhadap *Stakeholdernya*. Dengan adanya pengawasan dewan komisaris yang optimal maka perusahaan dapat dikendalikan dan mengendalikan perusahaan dari sikap *oportunity* para manajer perusahaan. Maka pada penelitian ini peneliti memiliki hipotesis:

H2 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.2.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi memiliki tanggung jawab pada kegiatan operasional dalam rangka menjalankan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dewan direksi pada dasarnya memiliki hak pengendalian dalam mengelola sumber daya perusahaan. Menurut hasil penelitian Ningrum & Rasmini, (2022) Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sesuai dengan teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tetapi harus peduli dan bermanfaat untuk *Stakeholdernya*. Dewan direksi memiliki tugas sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui oleh dewan komisaris. Dari uraian di atas pada penelitian ini peneliti memiliki hipotesis:

H3 : Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Banyak sedikitnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Menurut Maryadi, & Dermawan, S., (2019) Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan pada penelitian Onoyi, J., & Windayati, T. (2021) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, hasil dari penelitian Amalia, N., & Khuzaini, K. (2021) Menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

kinerja keuangan. Dari ketiga hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Ukuran perusahaan yang besar sering kali menghasilkan kredibilitas yang lebih tinggi di mata pelanggan, investor, dan pemasok. Sesuai dengan teori *Stakeholder* perusahaan harus memiliki tindakan dan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan, salah satunya dengan mengelola ukuran perusahaan. Hal ini dapat memperbaiki persepsi terhadap stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan, serta akses terhadap sumber daya eksternal. Oleh karena itu, ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan perusahaan dalam mengakses sumber daya, memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan, yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Maka pada penelitian ini peneliti memiliki hipotesis:

H4 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.5 Pengaruh Manajemen Risiko Kredit, Tata Kelola, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan

Sebuah perusahaan tentunya memiliki harapan mengenai kinerja keuangan yang bagus. Sesuai dengan teori *stakeholder* kinerja keuangan yang baik bisa menarik minat investor untuk melakukan aktivitas investasi, maka dari itu seluruh bidang pada perusahaan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dari pengaruh ketiga variabel independen (manajemen risiko kredit, tata kelola, dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (kinerja keuangan) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka dapat disimpulkan hipotesis dari pengaruh manajemen risiko kredit, tata kelola, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, yaitu:

H5 : Manajemen risiko kredit, tata kelola, ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.

